

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT  
GUNA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA**

(Studi di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**Oleh:**

**Dionisia Noyaliane Utary**

**2018210168**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

Pembangunan adalah suatu proses pemahaman tentang tujuan negara sebagai wujudan rakyat kesejahteraan dan juga kemakmuran secara merata di seluruh Indonesia, pembangunan sebagai upaya untuk bekerja pada norma kehidupan dengan cara yang berkelanjutan untuk memiliki pilihan untuk menentukan nasib di tangan mereka sendiri, untuk mengajar orang tertentu dan membebaskan mereka dari ketergantungan pada orang yang berbeda. Pembangunan pondasi dan perkantoran dilakukan untuk membantu pengembangan latihan manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memutuskan upaya pemerintah kota dalam memberdayakan kerjasama daerah untuk lebih mengembangkan kemajuan kota dan memutuskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pada mengupayakan pemerintah kota untuk mendorong dukungan daerah untuk lebih mengembangkan perbaikan di kota Tawangargo, Wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Jenis teknik dilakukan pada riset berikut ialah strategi subjektif. Prosedur pemilahan informasi dengan pertemuan, persepsi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan ialah riset sendiri.

**Kata Kunci:**Pemerintah, Masyarakat, Pembangunan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ialah suatu perjalanan memahami tujuan negara sebagai perwujudan rakyat kesejahteraan dan makmur serta merata di seluruh Indonesia, kemajuan sebagai karya untuk bekerja pada norma kehidupan secara terkendali untuk memiliki pilihan untuk menentukan nasib di tangan mereka sendiri, khususnya mengajar orang dan membiarkan mereka keluar dari ketergantungan pada orang yang berbeda. Pembangunan yayasan dan kantor selesai untuk membantu latihan manusia dikembangkan. Dalam mengakui tujuan kemajuan, semua kemungkinan reguler harus diselidiki, dibuat, dan digunakan sebaik yang diharapkan. Demikian pula dengan manusia sebagai populasi yang sangat besar, informasi dan kemampuan harus diperluas sehingga mereka dapat menyelidiki, menciptakan dan menggunakan kemampuan alam tanpa batas, dan pelaksanaan program perbaikan tercapai.

Perencanaan pengembangan akan tepat, dilakukan secara menyeluruh dan hasil yang bermanfaat setiap kali dilakukan untuk mengatasi masalah lokal. Kemajuan harus diselesaikan oleh individu, oleh individu dan untuk individu. Pandangan ini menunjukkan aturan sistem berbasis suara dalam gagasan pergantian acara publik. Kelompok masyarakat harus dilibatkan secara langsung bukan karena persiapan, melainkan sebagai jenis dukungan dalam hal perhatian penuh. Dalam siklus kemajuan, individu tidak hanya diperlakukan sebagai barang, melainkan sebagai subjek dan penghibur atau penghibur. Pemajuan kota adalah usaha untuk mewujudkan kepuasan dan kehidupan pribadi atas bantuan pemerintah jaringan provinsi sudah menentukan UU RI No. 6 Tahun 2014 terkait perkotaan. Pemerintah kota harus melengkapi dewan kota, dengan cara ini kepala kota dan perangkatnya memainkan bagian yang harus dilakukan secara terpisah. Sesuai kewajiban dan kewajiban kepala desa. Kepala kota dan pemerintah kota memiliki

kewajiban untuk mempersiapkan kerjasama daerah yang sedang dikembangkan. Dengan tugas otoritas publik dalam memberdayakan dukungan perbaikan, diyakini bahwa individu Kota Tawangargo dapat mengembangkan kotanya sehingga lebih maju. Dengan landasan kerjasama yang baik antara individu daerah dan pemerintah kota, maka akan menumbuhkan perhatian untuk membangun keharmonisan antara dua pertemuan tersebut.

Menurut Siaga dalam (Sugiyono 2010: 46), pembangunan ialah sebuah usaha ataupun sebuah perangkaian untuk membangun dan melakukan inovasi sudah di susu dan melakukannya secara kesengajaan oleh Negara. Negara ataupun pemerintahan menuju inovasi pembangunan negara. Perbaikan kota tergantung pada proklamasi (Adisasmita 2006: 4), bahwa kemajuan kota adalah semua latihan perbaikan yang terjadi di desa dan mencakup semua bagian kehidupan daerah setempat, dan dilakukan secara terkoordinasi dengan membuat perbaikan diri bersama membantu. Intinya adalah untuk bekerja pada bantuan pemerintah jaringan provinsi mengingat kapasitas dan potensi aset tetap (SDA) mereka melalui bekerja pada kepuasan pribadi, kemampuan dan dorongan daerah. Kemajuan kota memiliki arti penting untuk menciptakan jaringan pedesaan dengan berfokus pada bagian-bagian kebutuhan daerah setempat. Di sini masuk akal bahwa kemajuan kota adalah bagian yang tidak dapat dibedakan dari pergantian peristiwa publik, peningkatan kota adalah hasil utama dari pergantian peristiwa publik. Pelaksanaan pembangunan kota yang berhasil berdampak pada kemajuan kemajuan masyarakat nantinya.

Dukungan wilayah lokal adalah kerjasama individu atau pertemuan lokal dalam mengenali masalah, memutuskan dan memberikan pengaturan pilihan melalui pertimbangan, keterampilan, waktu, modal atau bahan untuk program perbaikan yang dilakukan oleh otoritas publik sebagai tujuan, investasi membawa penguatan, yang artinya, setiap orang memiliki pilihan untuk menawarkan sudut pandang. dalam menentukan kesimpulan tentang kehidupan mereka. Investasi

memberdayakan individu atau perkumpulan untuk berkontribusi atau mengadakan latihan bersama, dalam pandangan kesukarelaan dengan tujuan agar rasa tanggung jawab bersama mengenai kepentingan perkumpulan atau perkumpulan berkembang.

Menurut Mardikanto, (2015) dukungan kawasan yang dikembangkan dapat mengambil struktur yang berbeda, yang secara keseluruhan dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Asosiasi memutuskan arah prosedur dan strategi perbaikan yang diselesaikan oleh otoritas publik. Hal ini terjadi dalam siklus politik, namun juga dalam interaksi sosial dan hubungan antara pihak-pihak tertentu di mata publik.
2. Kontribusi dalam memikul beban dan kewajiban sejauh mengaktifkan sumber-sumber dana perbaikan, latihan-latihan yang bermanfaat secara kekeluargaan, dan komando sosial sepanjang masa kemajuan.
3. Kontribusi dalam menerima hasil dan penghargaan dari kemajuan dengan cara yang tidak memihak. Setiap distrik dan pertemuan lokal tertentu dapat membangun kontribusi mereka dalam latihan yang bermanfaat melalui perluasan peluang dan arah yang konsisten.

Hasil perbaikan tidak semata-mata tergantung pada otoritas publik mengingat pekerjaan semua bagian masyarakat juga mempengaruhi kemajuan suatu peristiwa, tugas pemerintah yang sedang berlangsung hanyalah sebagai fasilitator, pengontrol, inspirasi dalam penataan yayasan publik. Daerah merupakan penggerak utama kemajuan, dimana kontribusi kerjasama daerah dalam pelaksanaan perbaikan dipandang siap untuk mengatasi lubang-lubang perbaikan yang terjadi, kadang-kadang mempunyai keinginan supaya bisa tercapai oleh PEMDA. Kesesuaian antara tujuan yang akan dicapai daerah.

Dari konsekuensi persepsi awal yang dibuat oleh pencipta di lapangan, ada beberapa isu yang muncul mengenai jenis dukungan daerah dalam pelaksanaan perbaikan di Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, kabupaten Malang, khususnya keterbatasan kapasitas aset dari pemerintah desa. Kemudian, pada saat itu, kebutuhan untuk peningkatan fungsional desa yang cukup besar akibatnya membutuhkan banyak perubahan, yang menyebabkan banyak biaya. Kendala lainnya adalah masih banyaknya jaringan desa yang belum mengetahui pentingnya kontribusi dalam pembangunan desa, baik secara nyata maupun tidak nyata.

Mengingat pemahaman dan percakapan berakhir, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Desa”**

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat guna meningkatkan pembangunan desa?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat guna meningkatkan pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat guna meningkatkan pembangunan desa.

**Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

Harapannya riset berikut bisa memberikan sumbangsih konsep terkait intelektual lebih khususnya ilmu tentang sosial, lebih khususnya juga ilmu tentang pemerintahan

## 2. Manfaat Praktis

Harapannya riset ini bisa berkontribusi dengan langsung pada sumbangsih ide-ide yang sangat dibutuhkan untuk pemerintahan desa untuk melakukan dorongan yang berpartisipasi bagi masyarakat untuk peningkatan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Makasar: Graha Ilmu.
- Adissasmita, Rahardjo. 2010. *Pertumbuhan Dan Efektifitas Pembangunan Tata Ruang Wilayah*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Devyanti. 2013. *Factor Penghambat Dan Factor Pendukung Dalam Pembangunan*. Jurnal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2.
- Juri, J. & Tanjung, T. 2017. *Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan*. Vol 2 Nomor 2, 103-119.
- Kurniawan, A. B. 2015. *Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Vol 3. Nomor 5, 1605-1619.
- Mikkelsen, 2011. *Metode Penelitian Partitoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. 2022. *Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Vol 1 (Nomor 1), 18-33.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Surasih, Maria Eni. 2003. *Pemerintah Desa Dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga
- Sumaryadi. 2010. *Sosiologi pemerintah dari perspektif pelayanan*
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta:

SUN

- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UB Press.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia